

**PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DI KABUPATEN
GOWA: ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN**

**Muhammad Idrus Taba¹⁾, Haris Maupa²⁾, Dian Anggraece Sigit Parawansa³⁾,
Muhammad Ismail⁴⁾, Cepi Pahlevi⁵⁾**

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

E-mail: emitaba71sa@gmail.com , hmaupa@yahoo.co.id , dianparawansa@fe.unhas.ac.id ,
ismailpabo@fe.unhas.ac.id , cepipahlevi@fe.unhas.ac.id

Abstract

This research aims to identify and classify and describe the relationship between stakeholders involved in the development of KSPK Tinggimoncong and its surroundings. This study uses a descriptive type of research with qualitative methods. Data and information collection techniques are carried out by direct observation in the field, in-depth interviews, and literature studies. Based on the results of the study, there are 14 stakeholders consisting of the government, both categories of institutions at the National, Provincial, District, Sub-District, village, community, and private sectors through Destination Management, Corporate Social and Environmental Responsibility funds, to other rights such as tourism entrepreneurs, educational institutions, and the media. Stakeholder analysis resulted in four classifications of regional stakeholders, including (a) key players, namely the Gowa Tourism and Culture Office, the Gowa regency Regional Planning Agency, (b) subject, consisting of Pokdarwis Malino and companies, namely Perum Perhutani, PLN, PTPN XIV (c) context setter, including the Ministry of Tourism at the central government level, BKSDA South Sulawesi and BPCB South Sulawesi at the provincial government level, and the Gowa, Gowa environmental service, BPBD Gowa, Department of industry and trade Gowa, Dinsospmd Gowa., tourism entrepreneurs, media, educational institutions, NGOs, health facility providers.

Keywords : *Strategic Areas, Tourism, Stakeholders*

1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang terus tumbuh dan diperhitungkan di provinsi Sulawesi Selatan. Dampak dari peningkatan kunjungan wisatawan provinsi Sulawesi Selatan pada 2023 tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,14% (*year of year*), lebih tinggi dari level nasional yang tercatat sebesar 5,50, % (*year of year*) (BPS, 2022);(Bank Indonesia, 2023). Walaupun pada bulan November 2023 yang tercatat 1.132 kunjungan wisman ke Sulawesi Selatan mengalami penurunan sebesar 3,66 persen dibanding bulan Oktober 2023 sebanyak 1.175 kunjungan, tetapi Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Sulawesi Selatan pada November 2023 mengalami peningkatan yaitu dari 53,69 persen pada Oktober 2023 menjadi 57,39 persen pada November 2023.

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan dengan berbagai potensi besar pengembangan pariwisata serta memiliki beberapa bagian wilayah yang termasuk dalam salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pemerintah Kabupaten Gowa turut merespon dan mendorong berbagai destinasi wisata untuk berkembang, melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPANDA). Terkait Pembangunan Destinasi Pariwisata, obyek daya tarik wisata di Kabupaten Gowa dikelompokkan menjadi Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) yang di dalamnya terbagi atas kawasan-kawasan strategis pariwisata, yakni Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dengan tujuan pengembangan dan pengelolaan yang lebih terarah.

Salah satu KSPK yang sedang dikembangkan pemerintah daerah kabupaten Gowa adalah KSPK Tinggimoncong dan sekitarnya. KSPK Tinggimoncong dan sekitarnya ini merupakan magnet bagi tujuan wisata Dataran Tinggi di Gowa. Banyaknya Pemangku Kepentingan yang ada pada

kawasan ini, baik tingkat masyarakat lokal, antarpemerintah daerah, maupun pemerintah pusat merupakan tantangan terbesar pengembangan pariwisata.

Sebagai bagian dari kawasan dataran tinggi Tinggimoncong, pengembangan KSPK Malino dan sekitarnya menjadi penting dalam mendukung pembangunan pariwisata di zona inti pariwisata kawasan dataran tinggi Tinggimoncong. Pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten di Tinggimoncong dan sekitarnya tidak cukup hanya dengan memetakan potensi dan menawarkan obyek daya tarik wisata yang ada. Banyaknya Pemangku Kepentingan yang ada menjadikan pengelolaan KSPK Tinggimoncong dan sekitarnya menjadi suatu usaha yang kompleks.

Beberapa kajian memperlihatkan, masing-masing Pemangku Kepentingan pada Kawasan belum sinergis sehingga benturan konflik kepentingan menjadi kendala yang sering dihadapi (Masrurun & Nastiti, 2023). Peranan Pemangku Kepentingan dalam upaya pengelolaan destinasi pariwisata merupakan salah satu unsur penting demi mempertahankan daya saing dan merupakan faktor utama untuk bertahan dalam dinamika dan perkembangan pasar pariwisata saat ini. Destinasi yang mampu mempertahankan keunggulan kompetitifnya akan cenderung ke arah praktik inovatif dalam strategi kompetitif serta menarik kunjungan wisatawan (N. Fernando, 2015); (Zainuddin et al., 2016).

Pemangku Kepentingan merupakan aktor-aktor kunci yang dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Pemangku Kepentingan ini dapat berupa organisasi, komunitas, kelompok sosial ekonomi, pemerintah, atau lembaga yang berasal dari berbagai dimensi pada setiap tingkat golongan masyarakat sehingga sangat dimungkinkan terjadinya benturan konflik kepentingan antar Pemangku Kepentingan. Selain itu, Pemangku Kepentingan memiliki berbagai tantangan serta kemungkinan untuk terjadinya disfungsi peran. Disfungsi peran tersebut tentunya akan membawa dampak negatif yang dapat menjadi hambatan dalam kolaborasi antarpemangku kepentingan (M. Iqbal, 2007);(Kusumatantya, 2013);(Dibgy & Millar, 2008)

Oleh sebab itu, diperlukan tinjauan khusus mengenai Pemangku Kepentingan atau pihak-pihak yang berkepentingan pada pengembangan pariwisata di KSPK Malino dan sekitarnya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) siapa saja pihak-pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan pada pengembangan pariwisata di KSPK Malino dan sekitarnya, dan (2) bagaimana pengaruh dan kepentingan dari para aktor yang ada, serta (3) bagaimana hubungan antar Pemangku Kepentingan pariwisata di KSPK Malino dan sekitarnya sesuai dengan peran dan fungsi yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan serta menggambarkan hubungan antar Pemangku Kepentingan yang terlibat dalam pengembangan KSPK Tinggimoncong dan sekitarnya.

2. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada pada Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Tinggimoncong dan sekitarnya, kawasan ini merupakan bagian dari dataran tinggi Tinggimoncong yang secara administratif terletak di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Kawasan ini memiliki daya tarik wisata cukup beragam. Amenitas atau sarana-prasarana pariwisata, seperti usaha homestay, usaha warung makan, serta sarana usaha penunjang pariwisata lainnya relatif sudah tersedia. Pada kawasan ini terdapat pengelolaan pariwisata yang dijalankan pemerintah kabupaten ataupun oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis (Pemda Kabupaten Gowa, 2019);(Pemerintah Kabupaten Gowa, 2023).

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview), dan dokumentasi (Sugiyono, 2017). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah empat puluh delapan Pemangku Kepentingan yang ditentukan secara purposive.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian kualitatif adalah jenis data yang berasal bukan dari angka-angka dan terdiri atas deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan langsung di lapangan dan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka berupa dokumen yang berkaitan dengan lokasi penelitian.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode analisis pemangku kepentingan. Metode ini menurut Reed (Reed et al., 2009), meliputi tahapan:

- a. Identifikasi Pemangku Kepentingan, dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan Pemangku Kepentingan yang terlibat dalam pengembangan KSPK Malino dan sekitarnya;
- b. Hubungan antar Pemangku Kepentingan dan derajat kepentingan dipetakan berdasarkan dokumen dan hasil wawancara dengan informan kunci. Pemetaan ini merupakan gambaran dari hubungan antar Pemangku Kepentingan, baik yang tertulis di dalam dokumen (tugas pokok dan fungsi) maupun yang terlaksana di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Pemangku Kepentingan

Berdasarkan hasil identifikasi pemangku kepentingan, diperoleh dua puluh delapan Pemangku Kepentingan yang terlibat atau memiliki kepentingan dalam pariwisata di kawasan strategis pariwisata kabupaten Gowa dan sekitarnya. Keberhasilan dalam organisasi pariwisata, baik publik maupun swasta, dapat disebabkan oleh organisasi yang dapat menjamin kepuasan Pemangku Kepentingan yang menyangkut semua pihak dengan pengaruh dan kepentingan yang berbeda-beda (Damanik, 2013). Ini dapat terbentuk melalui kemitraan antarpemangku kepentingan serta hasil dari kebijakan yang efisien (Kort et al., 2016).

Keberhasilan suatu destinasi pariwisata ditentukan dari efektivitas dan kemitraan antarpemangku kepentingannya. Penelitian telah menemukan bahwa terdapat tingkat kompleksitas dan tantangan yang tinggi dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam pariwisata, terlebih dalam proses perencanaan pengembangan (Hatipoglu et al., 2016);(Lemmetynen & Go, 2005);(Ruhanen, 2009). Selain itu, kemitraan antarpemangku kepentingan sangat penting untuk memberi manfaat jangka panjang bagi destinasi. Banyak pembuat kebijakan dan praktisi yang perlu terlibat erat di bidang kepariwisataan, mengingat pentingnya daya saing destinasi terhadap pengembangan destinasi (Shariffuddin et al., 2020).

Kepariwisataan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah, baik perencanaan jangka panjang, menengah, maupun perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Gowa tidak boleh mengabaikan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, misalnya RTRW dan tidak bisa dilaksanakan jika tidak diintegrasikan ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Oleh sebab itu, sebelum menyusun rencana pariwisata, penting untuk melihat dimana posisi kepariwisataan Kabupaten Gowa dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan level nasional, provinsi, dan Kabupaten Gowa sendiri. Dokumen perencanaan level nasional terdiri dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional (RTRW Nasional), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Ripparnas), RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, Ripparprov Sulawesi Selatan, RTRW Kabupaten Gowa, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Gowa, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa. Hasil kajian dokumen perencanaan ini akan memberikan batasan tentang arah pembangunan jangka panjang kepariwisataan Kabupaten Gowa dengan memperhatikan rencana pemanfaatan ruang level nasional dan daerah, serta rencana pembangunan daerah.

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional merupakan peta jalan rencana penggunaan ruang, baik pada tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Berdasarkan PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 3 yang telah diubah menjadi PP No. 13

Tahun 2017, RTRWN merupakan pedoman penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga dalam menyusun rencana pemanfaatan ruang tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus memperhatikan RTRWN, termasuk dalam menyusun rencana pembangunan kepariwisataan.

Indonesia sebagai sebuah ruang telah dibagi ke dalam lima struktur ruang wilayah nasional berdasarkan PP No. 13 Tahun 2017. Struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Kelima struktur ruang tersebut adalah sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Selain membagi ruang menjadi pusat-pusat permukiman dan jaringan sarana prasarana, tata ruang nasional juga mendistribusikan peruntukan ruang dalam suatu wilayah meliputi peruntukan ruang untuk kawasan dengan fungsi lindung dan fungsi budi daya.

Sistem perkotaan nasional membagi Provinsi Sulawesi Selatan menjadi dua pusat kegiatan yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Berfungsi sebagai PKN, kawasan perkotaan Mamminasata diharapkan berfungsi melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Kawasan ini terdiri dari empat daerah di Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar, Kabupaten Gowa (Sungguminasa), Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Maros. Menurut ATRBPN, tujuan utama Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah dan/atau pusat orientasi pelayanan berskala internasional serta penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia, sehingga mampu memegang peran sebagai pusat logistik Indonesia timur, baik sebagai pusat produksi sekaligus pusat dan jalur distribusi nasional dan internasional. Walaupun Makassar menjadi kota inti dalam Kawasan Mamminasata, namun Kabupaten Gowa bisa menikmati sarana dan prasarana Kota Makassar, terutama transportasi yang dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata. Infrastruktur transportasi yang telah tersedia di Kota Makassar dan bisa menjadi modal dalam pengembangan pariwisata adalah bandara internasional, pelabuhan, dan angkutan darat seperti bus yang menghubungkan antara Makassar, Gowa, Takalar, dan Maros.

Selain PKN, beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Selatan juga masuk dalam Pusat Kegiatan Wilayah, yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Daerah tersebut adalah Kabupaten Pangkajene, Jeneponto, Kota Palopo, Kabupaten Watampone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Barru, dan Kota Parepare. Daerah-daerah ini dipilih sebagai PKW Sulawesi Selatan karena memenuhi tiga kriteria yaitu pertama, karena dianggap sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor pendukung PKN, kedua sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, dan ketiga merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi untuk melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. Penetapan tujuh daerah ini sebagai PKW harus dilihat sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Gowa, karena PKW merupakan pendukung dari Kawasan Perkotaan Mamminasata. Berikut adalah table identifikasi pemangku kepentingan.

Identifikasi Pemangku Kepentingan Terkait Peran dan kondisi eksisting

Tabel 1. Identifikasi Pemangku Kepentingan

Level	Pemangku Kepentingan	Peranan menurut aturan	Peran yang sebenarnya	Sumber daya
Nasional	1. Kementrian Pariwisata	a. Pembuatan kebijakan b. Penetapan Kawasan strategis pariwisata	Menetapkan Kawasan strategis pariwisata Sulsel	Kebijakan

		nasional		
	2. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)	a. Penyisihan benda cagar budaya b. Pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya c. Perlindungan dan pemugaran benda cagar budaya	a. Memiliki situs cagar budaya b. Perlindungan dan pemugaran cagar budaya	a. Kebijakan b. Situs cagar budaya
	3. Perusahaan (Perhutani, PLN)	a. Pendanaan CSR b. Pendampingan program c. Pemilik lahan	a. Pendanaan di Kecamatan Tinggimoncong b. Koordinasi perencanaan desa wisata lintas OPD	a. Lahan b. Kewenangan c. Anggaran d. Investasi
Provinsi	4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Sulawesi Selatan	a. Pembuat kebijakan b. Pembuat kebijakan KSPN Sulsel	a. Membuat detail perencanaan KSPN Tinggimoncong dan Sekitarnya. b. Membuat kebijakan terkait Kawasan dataran tinggi.	Kebijakan
Kabupaten	5. Sekertariat daerah Kabupaten Gowa	Pengkoordinasian perumusan kebijakan	a. Pendanaan di Kecamatan Tinggimoncong b. Mengelola Kawasan wisata	Kebijakan
	6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gowa	a. Pembuat kebijakan b. Menetapkan Kawasan strategis pariwisata Kabupaten c. Pengawal perencanaan pariwisata Disparbud	a. Menetapkan Kawasan strategis pariwisata kabupaten b. Mengawal perencanaan pariwisata Disparbud	a. Peraturan kebijakan b. Kajian
	7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa	a. Pembuat kebijakan destinasi pariwisata	a. Mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan destinasi wisata Malino	a. Peraturan destinasi pariwisata (atraksi dan

		b.Pembuat perencanaan KSPK c.Pelaksanaan pengelolaan obyek daya Tarik, pajak, dan retribusi untuk penerimaan pendapatan daerah	b. Mengelola berbagai event, diantaranya beautiful malino c.membuat perencanaan KSPK	amenitas) b.Pengelolaan kelembvagaan pariwisata c.Pemasaran produk pariwisata d.Pengelolaan asset pariwisata
	8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Gowa	a.Pelaksana teknis b.Pembuat kebijakan	Pembangunan jalur alternatif jalan poros Makassar-Malino	a.Peraturan kewenangan terkait pembangunan jalan dan sarpras
	9. Dinas Pertanian, tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Gowa	a.Pelaksana teknis b.Pembuat kebijakan	Sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan peryanian	a.Peraturan terkait pertanian b.kewenangan pengelolaan dikawasan Tinggimoncong
	10.Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gowa	a.Pembuat kebijakan b.Pelaksana teknis	Menyusun kebijakan kebersihan, penanganan sampah dan limbah B3 serta kehutanan di Kawasan pariwisata Kecamatan Tinggimoncong	Peraturan
	11.Dinas Perindustri dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Gowa	a.Pelaksana teknis b. Pembuat kebijakan	Sosialisasi dan pelatihan pelaksana usaha pariwisata (UMKM produk local Malino)	a.Peraturan b.Kewenangan (terkait pengembangan UMKM)
	12. Dinas Sosial dan Pemberdayaan perempuan Kabupaten Gowa	a.Pelaksanaan tekjnis b.Pembuat kebijakan	Penerapan program inivasi desa	a.Peraturan b.Kewenangan (terkait pembangunan desa/program inivasi desa)
	13. Badan Penanggulangan Bencana	a.Pembuat kebijakan	Pemberian peringatan titik rawan bencana dan	Kebijakan

	Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa	b. Pelaksana tekjnis (edukasi, mitigasi)	edukasi kepada masyarakat	
	14. Forum Komunikasi Pokdarwis Kabupaten Gowa	a. Koordinator Pokdarwis Kab. Gowa b.membantu Disparbud Gowa melakukan penguatan kelembagaan priwisata di masyarakat melalui konsep pengembangan desa wisata	Menyusun dan melaksanakan pengembangan pariwisata jangka Panjang dan jangka pendek Bersama dinas terkait melalui forum diskusi ruitn bulanan	a.SDM b.Jaringan ke dians terkait

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa stakeholders pariwisata di KSPK Tinggimoncing, Malino dan sekitarnya terdiri atas lembaga tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, hingga lainnya, seperti pengusaha bidang pariwisata, akademisi, dan media dengan berbagai kepentingan, baik pada kategori pemerintah, masyarakat atau civil society organization, maupun swasta melalui pengelolaan destinasi maupun dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Berdasarkan identifikasi di atas, klasifikasi pemangku kepentingan kemudian dirumuskan melalui analisis keterlibatan pemangku kepentingan. Analisis ini didapat melalui hasil identifikasi pada tabel di atas berdasarkan wawancara mendalam kepada para pemangku kepentingan serta observasi lapangan dan studi Pustaka; hasilnya diklasifikasikan ke dalam: (1) formasi penerbitan atau penetapan kebijakan, (2) pemberian dukungan pendanaan, (3) pelaksanaan penelitian, (4) fasilitasi berupa teknologi atau pelatihan, dan (5) pelaksanaan konservasi serta pemeliharaan infrastruktur pariwisata.

Identifikasi Pemangku Kepentingan Keterlibatan Tinggi

Tabel 2. Identifikasi Pemangku Kepentingan KSPK Tinggimoncong dan Sekitarnya

Pemangku Kepentingan	Kebijakan Pariwisata	Dukungan dana	Penelitian	Fsilitasi Teknologi /Pelatihan	Konservasi/Pe meliharaan infrastruktur
Dispadbur	vv	vv	vv	vv	vv
Bappeda	vv	vv	v	v	v
Kemperparekraf	vv	v	v	v	-
BKSD Prov	vv	-	-	-	vv
Pokdarwis	v	v	v	-	vv

Keterangan:

- vv : Sangat terlibat
- v : Sedikit terlibat
- : Tidak Terlibat

Identifikasi Pemangku Kepentingan Keterlibatan Sedang

Tabel 3. Identifikasi Pemangku Kepentingan KSPK Tinggimoncong dan sekitarnya

Pemangku Kepentingan	Kebijakan Pariwisata	Dukungan dana	Penelitian	Fasilitas Teknologi/Pelatihan	Konservasi/Pemeliharaan infrastruktur
Perusahaan/Perhutani	-	v	v	v	V
PLN					
DPUPR	-	V	-	-	Vv
Lembaga Pendidikan	-	-	vv	v	-

Berdasarkan tabel 2 dan tabel 3 di atas, terlihat bahwa peran pemangku kepentingan pada pariwisata KSPK Tinggimoncong dan sekitarnya, menunjukkan bahwa yang sangat intensif terlibat adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa dan Bappeda Kabupaten Gowa, Kemenparekraf, dan BKSD Provinsi Sulsel.

Menurut Shariffuddin (Shariffuddin et al., 2020), keberhasilan suatu destinasi pariwisata akan sangat ditentukan dari efektifitas dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Berdasarkan pengaruh dan kepentingan yang ada, para pemangku kepentingan Kawasan perlu komitmen yang lebih kuat dalam upaya pembangunan Kawasan. Hal ini dikarenakan secara formal, birokratis, dan procedural, Dinas Pariwisata Kabupaten Gowa berada pada posisi yang tidak strategis dalam melakukan komunikasi, koordinasi, dan Kerjasama antarinstansi/Lembaga di atasnya, seperti Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Sulsel, Balai Konservasi Sumberdaya alam, dan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Keterlibatan lembaga-lembaga ini berperan penting untuk memberi formulasi kebijakan, mendukung pendanaan, melakukan penelitian/advokasi, dan memfasilitasi teknologi/pelatihan, serta menjalankan konservasi serta pemeliharaan infrastruktur.

Pada tingkat Kabupaten, yang memiliki keterlibatan tinggi ialah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada level komunitas, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) memiliki peran strategis. Kelompok ini bertanggungjawab dalam upaya peningkatan sadar wisata bagi masyarakat pada destinasi wisata sekaligus menjadi pihak, yang secara structural ataupun nonstruktural dengan Lembaga lainnya dalam melakukan komunikasi, koordinasi, dan Kerjasama.

Identifikasi Pemangku Kepentingan Keterlibatan Rendah

Table 3. Identifikasi Pemangku Kepentingan KSPK Tinggimoncong dan sekitarnya

Pemangku Kepentingan	Kebijakan Pariwisata	Dukungan dana	Penelitian	Fasilitas Teknologi/Pelatihan	Konservasi/Pemeliharaan infrastruktur
Dinas Pehubungan	v	-	-	-	v
Dinas Perindag	-	v	-	v	-
Pemerintah desa	-	v	-	-	v

Sekretariat daerah	v	-	-	-	-
LSM	-	-	v	v	-
Dinas Sosial dan Pemper	-	-	-	v	-
Dinas pertanian	-	-	-	v	-
Dinas lingkungan hidup	-	-	-	-	v
BPBD	-	-	-	v	-

Hubungan Pemangku Kepentingan

Pada KSPK Tinggimoncong dan sekitarnya terdapat tiga pembagian aktor, yaitu aktor dalam pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota, antara lain BKSDA, Disparbud Gowa, Bappeda Gowa, Sekretariat Daerah, BPBD Gowa Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial dan Pemper, DLH, Aktor swasta dengan perannya sebagai pendamping program tanggung jawab sosial dan lingkungan dan lain sebagainya untuk masyarakat di Tinggimoncong ialah, Perum Perhutani (pemilik lahan), PLN, dan Malino Highland

Terakhir, masyarakat sebagai subjek dalam pengembangan sistem kepariwisataan adalah pokdarwis, pemilik usaha lokal, lembaga swadaya masyarakat, hingga pelaku usaha dan paguyuban pengemudi angkutan bus.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 14 pemangku kepentingan yang terdiri atas pemerintah, baik kategori lembaga di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, masyarakat, maupun swasta melalui pengelolaan destinasi, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, hingga hak lainnya seperti pengusaha bidang pariwisata, lembaga pendidikan, dan media.

Analisis stakeholders menghasilkan empat klasifikasi pemangku kepentingan kawasan, meliputi (a) key player, yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gowa, Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Gowa, (b) subject, terdiri atas Pokdarwis Malino dan perusahaan-perusahaan, yakni Perum Perhutani, PLN, PTPN XIV (c) context setter, meliputi Kementerian Pariwisata pada tingkat Pemerintah Pusat, BKSDA Sulawesi Selatan dan BPCB Sulawesi Selatan pada tingkat Pemerintah Provinsi, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, (d) crowd, meliputi pemerintah kecamatan, Dinas Petanian Gowa, DLH Gowa, BPBD Gowa, Disperindag Gowa, Dinsospmd Gowa, , pengusaha pariwisata, media, lembaga pendidikan, LSM, penyedia fasilitas kesehatan.

Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memberikan alternatif strategi bagi pengembangan tata kelola pariwisata di KSPK Tinggimoncong dan sekitarnya yang inovatif sehingga mampu mendorong dan menghasilkan keunggulan kompetitif pariwisata kawasan. Keberhasilan pembangunan pariwisata di KSPK Tinggimoncong dan sekitarnya akan sangat ditentukan dari efektivitas dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Selain itu, diperlukan komitmen yang kuat dan sinergi yang harmonis antarpemangku kepentingan dalam upaya pembangunan pariwisata di KSPK Tinggimoncong dan sekitarnya

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada semua penulis yang telah berkontribusi dalam penyusunan naskah ini, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang membantu dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2023). Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan. In *Bank Indonesia*.
www.bi.go.id
- BPS. (2022). Statistik Wisatawan Nusantara : Domestic Tourism Statistic. In Subdirektorat Statistik Pariwisata (Ed.), *Bps* (II, Vol. 1999, Issue December). Badan Pusat Statistik Indonesia.
<https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZmFiMWMxOWE3OGI1MzdkMTljZWQyNWRi&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjEvMTIvMTQvZmFiMWMxOWE3OGI1MzdkMTljZWQyNWRiL3N0YXRpc3Rpay13aXNhdGF3YW4tbnVzYW50YXJhLTIwMjAuaHRtbA%3D%3D&twoadfn>
- Damanik, J. (2013). *Pariwisata Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*. Pustaka Pelajar.
<https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/206321/pariwisata-indonesia-antara-peluang-dan-tantangan>
- Dibgy, R., & Millar, J. (2008). Social and Community Dimensions to ACIAR Projects. In *Australian Centre for International Agricultural Research* (Vol. 4).
- Hatipoglu, B., Alvarez, M. D., & Ertuna, B. (2016). Barriers to stakeholder involvement in the planning of sustainable tourism: The case of the Thrace region in Turkey. *Journal of Cleaner Production*, 111, 306–317. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.11.059>
- Kort, I. M., Verweij, S., & Klijn, E. H. (2016). In search for effective public-private partnerships: An assessment of the impact of organizational form and managerial strategies in urban regeneration partnerships using fsQCA. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 34(5), 777–794. <https://doi.org/10.1177/0263774X15614674>
- Kusumatantya, I. (2013). Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pembentukan Komunitas Guna Mencapai Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 1(1), 33. <https://doi.org/10.14710/jwl.1.1.33-48>
- Lemmetyinen, A. I., & Go, F. M. (2005). The Challenge of coordinating connectedness amongst different stakeholders in dispersed networks: The Case of Finnish Tourism Enterprises. *IMP Conference, Erasmus University*, 1–20.
- M. Iqbal. (2007). *Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian*. Litbang Pertanian.
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=116224&lokasi=lokal>
- Masrurun, Z. Z., & Nastiti, D. M. (2023). ANALISIS STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN WONOSOBO. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 17(1), 99–118.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (36th ed.). Remaja Rosdakarya.
<https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18755/DAFTAR>

PUSTAKA.pdf?sequence=9&isAllowed=y

- N. Fernando, I. (2015). What Competitive Strategies Way forward the Regional Competitiveness? A Comparative Economic Approach to Sri Lankan Tourism. *International Journal of Business and Management*, 10(4), 178–186. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v10n4p178>
- Pemda Kabupaten Gowa. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa. In *Pemerintah Kabupaten Gowa*. <https://www.garutkab.go.id/page/rpjmd>
- Pemerintah Kabupaten Gowa. (2023). *Dinas Pariwisata dan Kebudayaan*. Pemerintah Daerah Kabupaten GOWa. <https://pariwisata.gowakab.go.id/>
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
- Ruhanen, L. (2009). Stakeholder Participation in Tourism Destination Planning Another Case of Missing the Point? *Tourism Recreation Research*, 34(3), 283–294. <https://doi.org/10.1080/02508281.2009.11081603>
- Shariffuddin, N. S. M., Zain, W. M. A. W. M., & Azinuddin, M. (2020). Collaborative challenges among stakeholders on tourism destination competitiveness. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(1), 454–466.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/206060/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d.html>
- Zainuddin, Z., Radzi, S. M., & Zahari, M. S. M. (2016). Perceived Destination Competitiveness of Langkawi Island, Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 222, 390–397. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.190>